

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia secara sah mengimplementasikan demokrasi konstitusional, yaitu sistem politik yang meletakkan kedaulatan rakyat dalam kerangka hukum dasar yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara. UUD 1945 yang telah mengalami beberapa amandemen signifikan setelah reformasi menjadi landasan demokrasi Indonesia, sehingga memperkuat prinsip-prinsip representasi, tanggung jawab, dan pembatasan kekuasaan (Lijphart 2025). Dalam tatanan ini, warga memiliki peran sentral melalui pemilu yang langsung, bersih, jujur, adil, dan dilakukan secara rutin, yang dimana mencakup pemilihan legislatif, pemilihan presiden dan pemilihan langsung kepala daerah.

Periode Reformasi merupakan momen krusial dalam perubahan demokrasi Indonesia. Jatuhnya Orde Baru pada tahun 1998 memberikan kesempatan bagi liberalisasi politik yang berarti: pembatasan terhadap hak sipil dihapus, partai politik baru muncul, dan media mendapatkan kembali kebebasannya (Aspinall and Mietzner 2019, 106-107). Kebijakan desentralisasi yang diterapkan pada awal 2000-an turut mengubah interaksi antara negara dan masyarakat. Dengan otonomi daerah, masyarakat tidak hanya berpartisipasi dalam politik nasional tetapi juga memiliki dampak langsung terhadap pemimpin lokal mereka, yang dipilih melalui pemilihan kepala daerah (Hadiz 2010, 31). Langkah ini meningkatkan ruang partisipasi politik sekaligus memperkuat sistem akuntabilitas di level daerah.

Walaupun memiliki basis demokrasi yang kokoh, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Dampak oligarki, pemisahan politik, dan penggunaan uang dalam politik tetap menjadi isu mendasar yang menghalangi kualitas demokrasi (Robison and Hadiz 2004, 254). Selain itu, sejak akhir 2010, berbagai penelitian menunjukkan adanya gejala “*democratic backsliding*” atau penurunan demokrasi, seperti berkurangnya independensi lembaga pengawas dan bertambahnya kontrol negara terhadap kebebasan masyarakat sipil. Akan tetapi, mekanisme dasar demokrasi, pemilihan umum yang kompetitif, partisipasi masyarakat sipil, dan pluralisme politik, tetap bertahan dan menjadi elemen kunci yang memelihara Indonesia dalam jalur sistem demokrasi.

Salah satu dinamika yang paling mencolok adalah penguatan kekuasaan eksekutif. Jokowi memperluas aliansinya hingga melibatkan hampir semua partai besar di DPR, mengakibatkan lemahnya peran oposisi formal yang seharusnya menyeimbangkan pemerintah (Aspinall and Mietzner 2019, 106). Saat oposisi menjadi lemah, mekanisme *checks and balances* juga mulai hilang, sehingga pemerintah semakin bebas menetapkan agenda politik tanpa adanya tantangan yang berarti. Ini tercermin dalam sejumlah legislasi penting yang disetujui dengan cepat dan dengan sedikit keterlibatan masyarakat, seperti UU Cipta Kerja dan revisi UU KPK.

Perpindahan kekuasaan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden Prabowo Subianto dengan Wakilnya Gibran Rakabuming Raka menandai berlanjutnya kemunduran demokrasi yang sudah terjadi sejak akhir masa jabatan periode kedua Jokowi. Walaupun pemilu tetap dilaksanakan sebagai cara legitimasi elektoral,

proses politik dan cara yang memungkinkan Gibran menjadi wakil presiden menunjukkan adanya penurunan serius terhadap prinsip demokrasi berdasarkan aturan. Narasi publik tentang "anak haram konstitusi" mengandalkan argumen dari pelanggaran etika serius dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023. Ini dikuatkan oleh Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 yang menjatuhkan sanksi pemecatan kepada Ketua MK Anwar Usman karena terbukti melakukan pelanggaran etika serius dan memiliki konflik kepentingan yang jelas dalam mempermudah syarat usia keponakannya (Gibran) untuk ikut serta dalam kontestasi nasional

Dalam skala teoritis, pola ini merupakan manifestasi dari "*Autocratic Legalism*" (Scheppelle 2018, 546), di mana instrumen hukum digunakan secara prosedural untuk mensabotase substansi demokrasi demi kepentingan elit politik. Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti (2023) menegaskan bahwa fenomena ini bukan hanya sekadar dinamika politik pada umumnya, melainkan "rekayasa hukum yang manipulatif" yang mencederai integritas konstitusi. Posisi yang diduduki oleh Gibran dalam pemerintahan sebagai wakil presiden pada saat ini dipandang sebagai puncak dari politik dinasti yang dilegalkan melalui institusi yudikatif.

Penyusutan kekuatan institusi ini juga berdampak pada sektor ekonomi dan manajemen dengan bertambahnya risiko ketidakpastian hukum. Ketika pengisian jabatan publik tertinggi dianggap berasal dari proses yang "cacat etika," hal ini dapat menimbulkan pandangan masyarakat rendah kepercayaan yang menghalangi efektivitas kebijakan ekonomi jangka panjang. Kebijakan seringkali terperangkap dalam populisme pemilu guna mempertahankan legitimasi yang lemah di hadapan

publik, bukannya melakukan reformasi struktural yang diperlukan untuk menghindari jebakan pendapatan menengah.

Dampak pada aspek sosial berpacu pada pengakuan terhadap proses yang timbul dari persimpangan moralitas konstitusi, hal ini menjadi pengaruh pada tumbuhnya sinisme di masyarakat. Penurunan kepercayaan terhadap lembaga politik berpotensi mendorong meningkatnya sinisme dan melemahnya partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi, terutama dalam konteks kemunduran demokrasi di Indonesia (Power 2018, 327-329). Menurut (Warburton and Aspinall 2019, 265), warisan neo-patrimonialisme Orde Baru masih melekat kuat dalam struktur politik Indonesia, di mana kekuasaan oligarki dan kedekatan personal sering kali mengalahkan institusi formal. Fenomena Gibran dapat dilihat sebagai manifestasi kontemporer dari struktur ini, yang menegaskan tertutupnya akses kekuasaan berbasis meritokrasi bagi generasi muda.

Rasa tidak puas publik terhadap mundurnya akan demokrasi dan krisis legitimasi institusi yang hadir setelah transisi kekuasaan diutarakan melalui tindakan perlawanan yang tidak konvensional. Salah satu bentuk protes yang paling mencolok adalah pemakaian bendera *Jolly Roger Straw Hat Pirates* dari serial *anime* One Piece sebagai simbol dari Agustus hingga September 2025. Terjadinya fenomena ini menunjukkan perubahan strategi komunikasi politik masyarakat, terutama generasi muda, dari saluran institusi ke ekspresi simbolik yang berakar pada budaya populer. Pengibaran bendera One Piece menjelang HUT ke-80 Republik Indonesia adalah manifestasi resistensi kultural yang muncul dari

kekecewaan terhadap praktik demokrasi prosedural yang dianggap kehilangan esensi dan kemampuan representatif (Aqil and Atmojo 2025, 82, 91).

Pemanfaatan simbol budaya populer dalam arena politik tidak dapat dianggap sebagai tindakan yang bersifat tiba-tiba atau tidak berpolitik. Murti dan Dadiono (2025) mengungkapkan bahwa simbol *One Piece* mengalami politisasi makna, di mana nilai-nilai yang terikat pada narasi fiksi seperti kebebasan, kesetaraan, dan perlawanan terhadap otoritas yang tidak adil dapat diubah dan dipangkas menjadi bahasa kritik terhadap keadaan sosial-politik di Indonesia. Dalam hal ini, bendera *Jolly Roger* berperan sebagai sarana pengungkapan ketidakpuasan terhadap praktik kekuasaan yang dinilai elit dan tidak berlandaskan meritokrasi, serta sebagai alat untuk menciptakan kesadaran kolektif.

Fenomena ini menunjukkan adanya krisis dalam representasi simbol negara. Murti dan Dadiono (2025, 78) menekankan bahwa generasi muda tidak secara inheren menolak nasionalisme, melainkan melakukan renegotiasi terhadap arti nasionalisme ketika simbol-simbol resmi negara dianggap tidak berhasil merepresentasikan nilai keadilan sosial dan keterbukaan politik. Oleh karena itu, pengibaran bendera non-negara tidak bertujuan sebagai bentuk disintegrasi, melainkan sebagai bentuk kritik terhadap monopoli negara dalam mendefinisikan kebangsaan.

Aksi demonstrasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 2025 tidak hanya menggambarkan kondisi dinamika politik dalam negeri, tetapi juga menuai perkembangan sorotan signifikan media massa dan kemudian menarik perhatian internasional sebagai bagian dari tren protes global yang melibatkan kaum muda

dan masyarakat sipil di berbagai negara. Peliputan media internasional dan perdebatan dalam ruang publik global menempatkan unjuk rasa yang terjadi di Indonesia terlebih oleh kaum muda dalam konteks yang lebih luas terkait penurunan demokrasi, pengikisan lembaga negara, serta berkurangnya kebebasan sipil. Dalam era globalisasi informasi, saluran komunikasi antar negara melalui media massa dan *platform* digital memungkinkan narasi, simbol, dan aksi perlawanan dari satu konteks nasional bergema dan berinteraksi dengan pengalaman politik masyarakat di negara lain.

Ekspresi perlawanan simbolik yang serupa muncul di banyak negara secara bersamaan, menunjukkan resonansi transnasional ini. Pemanfaatan bendera *Jolly Roger Straw Hat Pirates* dari *anime* One Piece dalam demonstrasi di Nepal pada tahun 2025 adalah contoh yang jelas. Menurut laporan media internasional dan regional, para demonstran muda di Nepal mengangkat bendera sebagai bentuk protes terhadap pembatasan kebebasan berpendapat, korupsi, dan kebijakan pemerintah yang dianggap menindas (New Indian Express 2025; LiveMint 2025). Situasi politik saat itu menunjukkan bahwa demonstrasi ini muncul sebagai tanggapan terhadap penerapan larangan terhadap berbagai *platform* media sosial, yang dianggap membatasi kebebasan berpendapat (New Indian Express 2025; LiveMint 2025). Penerapan simbol ini searah dengan pemaknaan yang sebelumnya muncul dalam konteks demonstrasi di Indonesia, di mana bendera *Jolly Roger Straw Hat Pirates* dari *anime* One Piece dipahami sebagai bentuk kritik kreatif dan ekspresi simbolik rakyat terhadap dominasi elite politik serta penyempitan ruang sipil. Dalam kajian hukum dan demokrasi, fenomena “Bendera One Piece”

dipahami sebagai manifestasi kebebasan berekspresi di ruang publik yang memanfaatkan simbol budaya populer untuk menyampaikan kritik politik secara non-konvensional, sekaligus merefleksikan ketegangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak sipil dalam negara demokratis (Putri and Zubaedah 2025).

Nepal adalah republik federal demokratis parlementer dengan presiden Ram Chandra Paudel sebagai kepala negara dan perdana menteri yang dipilih melalui koalisi parlemen. Pemerintahan Nepal yang dipimpin oleh K. P. Sharma Oli harus mengundurkan diri pada tahun 2025 karena protes besar yang disebabkan oleh pembatasan kebebasan berpendapat dan pelarangan media sosial. Setelah itu, pemerintahan transisi dibentuk sesuai dengan konstitusi (Reuters 2025; Al Jazeera 2025). Proses ini menunjukkan bahwa Nepal tidak secara struktural mengalami transisi dari rezim ke otoritarianisme, karena distribusi kekuasaan terus terjadi melalui mekanisme konstitusional dan pemilu tetap diawasi. Namun demikian, kemunduran demokrasi ditunjukkan oleh tindakan represif pemerintah terhadap demonstrasi dan kebijakan yang membatasi kebebasan sipil. Meskipun institusi demokrasi formal tetap ada, tindakan pemerintah menuju ketidakliberalan (Levitsky and Way 2010, 57-58). Pola ini serupa dengan apa yang terjadi di Indonesia setelah era Jokowi, di mana kemunduran demokrasi ditunjukkan melalui pengurangan pemilu, bukan kehilangan kebebasan sipil dan institusi pengawas. Dengan demikian, demokrasi elektoral Nepal dan Indonesia tidak hanya menghadapi tekanan karena tidak memiliki rezim otoriter penuh, tetapi juga rentan terhadap standarisasi praktik kekuasaan yang semakin tidak jelas.

Ketidaksetaraan ekonomi dan marginalisasi kaum muda menjadi penyebab utama keretakan sosial di kedua negara tersebut, di mana masyarakat menghadapi banyak tekanan dari berbagai sumber. Ketidakstabilan sosio-ekonomi di Nepal disebabkan oleh peningkatan populasi yang tidak terkontrol, yang telah menyebabkan penurunan lingkungan dan persaingan sumber daya. Secara politik, dasar moral telah menurun, dan politikus seringkali mengutamakan kepentingan pribadi mereka daripada masalah masyarakat nyata (Dhakal 2020, 4). Ketidakpuasan meningkat saat pemerintah mencoba membatasi ruang digital, yang bagi generasi muda adalah alat komunikasi dan infrastruktur penting untuk kebebasan sipil.

Ketidakpuasan yang meningkat menyebabkan penggunaan simbol perlawanan inovatif, seperti bendera *Jolly Roger Straw Hat* dari *anime* One Piece. Fenomena ini berkembang menjadi bentuk "pemberontakan digital" yang kemudian masuk ke dunia nyata. Aksi massa di Indonesia dan Nepal menggunakan identitas bajak laut sebagai cara untuk menentang otoritas yang tidak adil. Setelah larangan media sosial utama di Nepal, gerakan Generasi Z mengorganisir massa dengan menggunakan *platform* seperti Discord, membentuk sebuah "kekuatan politik yang tidak terduga" yang menantang otoritas (Barma and Thapa 2025, 5). Pemakaian bendera itu menunjukkan transnasionalisasi simbol, di mana kisah-kisah fiksi tentang perjuangan melawan rezim global yang korup dianggap sebanding dengan situasi politik lokal mereka sendiri.

Pada akhirnya, bendera *Straw Hat* ini digunakan sebagai bukti nyata perjuangan untuk mengembalikan kebebasan yang terkungkung. Bendera tidak

hanya merupakan simbol estetika, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk menyatukan perasaan anggota masyarakat yang merasa dikhianati oleh sistem hukum dan politik resmi. Seperti yang ditunjukkan oleh mundurnya Perdana Menteri Nepal setelah demonstrasi besar yang menewaskan banyak orang, aksi ini berhasil menjatuhkan kekuasaan yang dianggap menindas (Barma and Thapa 2025, 5). Transnasionalisasi simbol *Jolly Roger* menunjukkan bahwa di negara-negara demokrasi seperti Indonesia dan Nepal, ketika pemerintah tidak melindungi hak-hak warga, orang akan menggunakan bahasa perlawanan mereka sendiri untuk menuntut pertanggungjawaban dan mengembalikan nilai-nilai dasar demokrasi.

Studi ini melihat bagaimana simbol budaya populer, khususnya bendera *Jolly Roger Straw Hat Pirates* dari anime *One Piece*, menyebar ke berbagai negara, termasuk Indonesia dan Nepal, dan bagaimana bendera *Jolly Roger Straw Hat Pirates* menjadi makna baru ketika digunakan dalam demonstrasi di negara-negara yang berdemokrasi. Kajian berfokus pada bagaimana simbol berkembang dari produk hiburan menjadi alat ekspresi politik dan perlawanan sipil, dan bagaimana makna tersebut diciptakan, dinegosiasikan, dan didistribusikan di seluruh negara. Tujuan dari penelitian ini untuk memahami makna simbolik bendera *Jolly Roger Straw Hat Pirates* pada tingkat denotasi, konotasi, dan mitos, serta peranannya dalam membangun identitas kolektif dan solidaritas transnasional di tengah penurunan kualitas demokrasi di kedua negara. Ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan semiotika Roland Barthes dan konsep transnasionalisasi budaya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka terlihat penggunaan simbol dari budaya populer melalui media digital seperti bendera *Jolly Roger Straw Hat Pirates* dari *anime* One Piece pada aksi demonstrasi kebebasan di Indonesia dan Nepal. Maka dari itu, penulis mengangkat rumusan masalah dalam pertanyaan “Bagaimana proses transnasionalisasi bendera *Jolly Roger Straw Hat Pirates* dalam *anime* One Piece sebagai simbol gerakan perlawanan pada demonstrasi di Indonesia dan Nepal tahun 2025?”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses transnasionalisasi bendera *Jolly Roger Straw Hat Pirates* sebagai simbol aktivisme sosial di Indonesia dan Nepal tahun 2025 melalui pendekatan semiotika Roland Barthes, guna menjelaskan bagaimana makna kebebasan, perlawanan, dan kritik terhadap kekuasaan dikonstruksikan oleh para demonstran, ditransformasikan dari konteks budaya populer global ke dalam praktik politik lokal, serta membentuk identitas dan solidaritas gerakan sosial lintas batas negara dalam dinamika Hubungan Internasional kontemporer.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Republik Indonesia dalam memahami perkembangan bentuk-bentuk ekspresi politik masyarakat, khususnya generasi muda, yang semakin banyak memanfaatkan simbol budaya populer sebagai media penyampaian kritik sosial dan

politik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa simbol yang digunakan dalam demonstrasi tidak selalu dapat dipahami secara literal, melainkan mengandung berbagai lapisan makna yang dikonstruksikan oleh para penggunanya. Oleh karena itu, pemerintah perlu memahami dimensi simbolik tersebut secara lebih komprehensif agar respons terhadap aspirasi publik tidak berhenti pada penilaian terhadap bentuk simbol yang digunakan, tetapi juga memperhatikan pesan sosial dan politik yang terkandung di dalamnya.

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Republik Indonesia dalam memahami perkembangan bentuk-bentuk ekspresi politik masyarakat, khususnya generasi muda, yang semakin banyak memanfaatkan simbol budaya populer sebagai media penyampaian kritik sosial dan politik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa simbol yang digunakan dalam demonstrasi tidak selalu dapat dipahami secara literal, melainkan mengandung berbagai lapisan makna yang dikonstruksikan oleh para penggunanya. Oleh karena itu, pemerintah perlu memahami dimensi simbolik tersebut secara lebih komprehensif agar respons terhadap aspirasi publik tidak berhenti pada penilaian terhadap bentuk simbol yang digunakan, tetapi juga memperhatikan pesan sosial dan politik yang terkandung di dalamnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Republik Indonesia dalam memahami perkembangan bentuk-bentuk

ekspresi politik masyarakat, khususnya generasi muda, yang semakin memanfaatkan simbol budaya populer sebagai media penyampaian kritik sosial dan politik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa simbol yang digunakan dalam demonstrasi tidak hanya berfungsi sebagai atribut visual, tetapi juga mengandung berbagai lapisan makna yang dikonstruksikan oleh para penggunanya serta dipengaruhi oleh arus budaya dan informasi yang melintasi batas negara. Oleh karena itu, pemerintah perlu memahami dimensi simbolik tersebut secara lebih komprehensif agar respons terhadap aspirasi publik tidak berhenti pada penilaian terhadap bentuk simbol yang digunakan, tetapi juga memperhatikan pesan sosial, politik, dan dinamika transnasional yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, pemerintah dapat mengembangkan pendekatan yang lebih adaptif terhadap perubahan pola komunikasi politik masyarakat di era globalisasi.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dalam lima bab yang saling berkaitan untuk menjawab rumusan masalah mengenai proses transnasionalisasi bendera *Jolly Roger Straw Hat Pirates* dari anime *One Piece* sebagai simbol gerakan perlawanan dalam demonstrasi di Indonesia dan Nepal. Bab I Pendahuluan berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini menjelaskan fenomena penggunaan bendera *Jolly Roger Straw Hat Pirates* dalam demonstrasi di Indonesia dan Nepal serta relevansinya dalam kajian Hubungan Internasional. Bab II Kajian Pustaka dan Metode Penelitian memuat literatur revidu, kerangka teoritik yang terdiri atas Teori

Semiotika Roland Barthes, konsep aktivisme sosial, dan konsep transnasionalisasi. Selain itu, bab ini juga menjelaskan kerangka alur pemikiran, hipotesis, serta metode penelitian yang mencakup ruang lingkup penelitian, jenis dan tipe penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data, teknik validasi data, dan teknik analisis data. Bab III *Anime One Piece, Bendera Jolly Roger* dan Pemaknaan Masyarakat Indonesia–Nepal membahas latar belakang kemunculan *anime* One Piece dan bendera *Jolly Roger Straw Hat Pirates* sebagai bagian dari budaya populer, nilai-nilai kebebasan dan perlawanan yang terkandung di dalamnya, serta bagaimana masyarakat Indonesia dan Nepal memaknai One Piece dan bendera *Jolly Roger Straw Hat Pirates* sebagai simbol perjuangan kebebasan dan perlawanan terhadap ketidakadilan. Bab IV Semiotika dan Transnasionalisasi Bendera *Jolly Roger Straw Hat Pirates* pada *Anime One Piece* sebagai Simbol Gerakan Aktivisme Sosial di Indonesia dan Nepal merupakan bab analisis penelitian. Bab ini membahas kondisi sosial-politik yang melatarbelakangi penggunaan simbol *Jolly Roger* dalam demonstrasi di Indonesia dan Nepal, analisis semiotika terhadap makna simbol tersebut berdasarkan konsep denotasi, konotasi, dan mitos, serta proses transnasionalisasi makna bendera *Jolly Roger Straw Hat Pirates* dari Indonesia menuju Nepal sebagai simbol gerakan aktivisme sosial. Bab V Penutup berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta rekomendasi yang dapat menjadi masukan bagi penelitian selanjutnya maupun pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kajian budaya populer, aktivisme sosial, dan transnasionalisasi simbol dalam Hubungan Internasional.